

PENGELOLAAN LAHAN DAN HUTAN GAMBUT SECARA LESTARI

EKOSISTEM GAMBUT

Gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang setengah membusuk dan memiliki kandungan organik yang tinggi. Sebagai bahan organik, gambut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Volume gambut di seluruh dunia diperkirakan sejumlah 4 triliun m³ yang menutupi wilayah sebesar kurang-lebih 3 juta km² atau sekitar 2% luas daratan di dunia, dan mengandung potensi energi kira-kira 8 miliar terajoule. Sedangkan sebagai sebuah ekosistem, lahan gambut berfungsi sebagai pengendali iklim melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon, serta memiliki kemampuan dalam menyimpan air yang besarnya 15-20 kali berat kering.



Degradasi hutan gambut memberikan dampak negatif terhadap populasi orang hutan
(sumber : wwf)

Gambut merupakan ekosistem yang unik, lapisannya tersusun dari timbunan bahan organik mati yang terawetkan sejak ribuan tahun lalu, permukaan atasnya hidup berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar. Jika bahan organik di bawahnya dan kehidupan di atasnya musnah, maka ekosistem ini sulit untuk bisa pulih kembali. Gambut terbentuk dari timbunan bahan organik yang sebagian lapuk, menumpuk dalam jangka waktu yang sangat lama, dan selalu dalam keadaan basah. Lahan gambut menyimpan karbon secara signifikan, yaitu 20-35% dari total karbon yang tersimpan di permukaan bumi.

Indonesia sebagian besar adalah wilayah gambut dan memiliki kapasitas sebagai penyimpan karbon sebesar 3-6 kali lebih tinggi daripada lahan gambut di daerah yang beriklim sedang, menyimpan setidaknya 550 gigaton karbon yang setara dengan seluruh biomassa terestrial lain (hutan, rerumpunan, dan belukar) atau dua kali jumlah seluruh karbon yang tersimpan pada hutan di seluruh dunia.

Secara kajian, gambut bersifat unik dengan kemampuan menyimpan air 15-20 kali berat kering gambut tersebut (fungsi hidrologis), dan bersifat hidropobisitas / kering tak balik (rawan kebakaran, bahayanya kanal yang dalam), serta kemampuannya melepas air ke arah horizontal lebih besar dibanding ke arah vertikal (proyek kanalisasi dapat mengakibatkan gambut cepat kering).

FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN GAMBUT

Hutan gambut dianggap sebagai ekosistem penting yang dapat memberikan sumbangan signifikan terhadap kestabilan iklim global. Karena keunikannya ekosistem gambut dianggap sebagai lahan marginal dan kurang memberikan manfaat secara finansial, padahal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Jika berada dalam kondisi alami terbaiknya, lahan gambut dapat mengatur keseimbangan pelepasan air, sehingga keseimbangan ekologi masih dapat terus terjaga, meskipun dalam kondisi kemarau panjang.

Fungsi dan manfaat hutan gambut antara lain adalah hidrologi, sosial-ekonomi, keanekaragaman hayati, dan penyimpanan karbon. Saat ini lahan gambut terdesak oleh berbagai ancaman yakni adanya konversi lahan, ekstraksi berlebihan, pengeringan/drainase, dan kebakaran. Dalam melaksanakan perlindungan dan pemanfaatan gambut, maka langkah yang paling bijaksana untuk melindungi lahan gambut dalam jangka panjang adalah mempertahankan gambut sebagai kawasan yang terlindungi, sehingga fungsi alaminya bisa tetap lestari.

DEGRADASI HUTAN GAMBUT

Luas lahan gambut di Indonesia menurut Kementerian Pertanian (2011) adalah 14,905 juta hektar. Jika dilihat dari penelitian oleh beberapa kalangan akan dijumpai perbedaan data dari tahun ke tahun, seperti luas lahan gambut Indonesia menurut Puslittanak (1981) adalah 26,5 juta hektar, sedangkan menurut Rieley dkk. (1997) dan Radjaguguk (1997), luasan gambut di Indonesia adalah 20,072 juta ha. Sementara itu, Dwiyono dan Rachman (1996), Subagyo (1998), Wibowo dan Suyatno (1998) dan Wetlands International (2004) menyebutkan bahwa luasan lahan gambut di Indonesia adalah 20,6 juta hektar. Dari data-data tersebut, dapat diketahui bahwa sejak tahun 1981 sampai

tahun 2004 terjadi pengurangan luasan lahan gambut sekitar 6 juta hektar di Indonesia, wilayah hutan dan lahan gambut memiliki luas lebih kurang 20 juta hektar atau setara dengan 50% luas lahan gambut tropis di seluruh dunia yang luasnya mencapai 40 juta hektar.

Degradasi lahan gambut di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dari 17 juta hektar lahan gambut yang ada pada tahun 2000, diperkirakan dari tahun 1987 hingga tahun 2000 saja sudah lebih kurang 3 juta hektar lahan gambut telah dibuka dan dikonversi, hal ini menyebabkan emisi gas rumah kaca (green house gas) meningkat secara drastis pada periode tersebut. Sedangkan dari tahun 2000 sampai dengan 2005, lebih kurang 1,04 juta hektar lahan gambut dibuka secara masif untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri, 78% hilangnya lahan gambut tersebut terjadi di Pulau Sumatra. Pemanfaatan lahan gambut secara besar-besaran ini merupakan kontributor terbesar dari emisi gas rumah kaca.



Habitat musang air terdapat di daerah hutan rawa gambut dan kini terancam punah (sumber : wwf)

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia memprioritaskan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%, namun hal ini bertentangan dengan implementasi praktek-praktek pengelolaan hutan dan penanganan terhadap bencana kebakaran yang menyebabkan kabut

asap. Hal ini disebabkan belum efektifnya kapasitas kelembagaan di tingkat lokal. Kementerian Kehutanan memberikan kewenangan pengelolaan hutan langsung kepada pemegang konsesi tanpa adanya pengawasan dan pemantauan yang maksimal.

Sebaran Wilayah hutan gambut di Indonesia meliputi Papua seluas 4,6 juta hektar, Kalimantan 4,5 juta hektar, Sumatera 7,2 juta hektar, sedangkan untuk Jawa, Halmahera, dan Sulawesi luasnya mencakup 300 ribu hektar. Dengan kalkulasi luasan gambut tersebut apabila laju kerusakan gambut tidak mampu dikendalikan atau bahkan dihentikan, maka bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara sebagai penyumbang emisi CO₂ terbesar dan juga pengekspor kabut asap dari kebakaran lahan yang dewasa ini menjadi agenda rutin dari tahun ke tahun. Selain itu pembukaan wilayah hutan gambut secara besar-besaran dengan menggunakan kanal juga memicu terjadinya subsidence atau penurunan permukaan gambut yang akan berdampak lebih parah apabila subsidence tersebut sudah menyebabkan intrusi air laut yang masuk ke permukiman dan wilayah garapan masyarakat, ini pastinya akan mengganggu sumber-sumber ekonomi masyarakat dan juga kebutuhan hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah tersebut. Penyebab kerusakan hutan dan lahan gambut adalah penebangan, kebakaran, pertambangan, drainase, dan konversi lahan.

POLA PEMANFAATAN HUTAN GAMBUT OLEH MASYARAKAT

Pola pemanfaatan hutan gambut oleh masyarakat sudah dilakukan semenjak zaman nenek moyang, dapat dilihat pada kegiatan ekonomi masyarakat Desa Penyengat yang didiami oleh suku asli Anak Rawa yang berlokasi di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Propinsi Riau. Mereka memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu

digunakan sebagai bahan pembuat rumah, perahu, dan untuk pemakaman. Non kayu seperti damar, getah sonde, ramuan obat-obatan tradisional, ritual adat, dan dapat menjadi alat tukar dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hutan adalah tempat mereka berburu dan lahan gambut yang mereka kelola ditanami dengan sagu, karet, dan palawija. Selain itu, laut dan sungai juga menjadi sumber utama dalam pemenuhan kehidupan mereka. Di desa ini terdapat pula kelompok perempuan yang terbentuk pada tahun 2009, kelompok ini bergerak membangun ekonomi mandiri dengan mengembangkan pola pertanian palawija di lahan yang terbatas.



Kelompok Perempuan "Bina Harapan" Desa Penyengat mampu mengelola lahan gambut dengan cara budidaya sayur (sumber : scale up)

PENYELAMATAN HUTAN GAMBUT OLEH MASYARAKAT

Pentingnya menyelamatkan hutan gambut beserta kelestariannya, maka Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) telah melakukan sejumlah aksi dan advokasi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lahan dan gambut. Jika kelestarian diabaikan, dapat dipastikan akan mengancam ruang hidup habitat satwa dan fauna, termasuk masyarakat dan ekologi.

JMGR tidak setuju dengan adanya ekspansi perusahaan kehutanan, perkebunan, dan tambang di wilayah gambut. Organisasi yang dibentuk pada tahun 2010 lalu, telah menggandeng media pers untuk bersama membangun pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan hutan dan wilayah gambut, yang saat ini pengelolaan dan pemanfaatannya banyak merusak lingkungan.



Melindungi dan menjaga hutan gambut tetap lestari memberikan sumbangan signifikan terhadap kestabilan iklim global (sumber : *greenpeace*)

Selain menggandeng media pers, pada 22 Juli 2013 yang lalu, JMGR bersama masyarakat dari tiga propinsi yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan beserta beberapa organisasi lingkungan, melakukan pertemuan masyarakat gambut di Palembang. Pertemuan ini sebagai respon maraknya konflik, perampasan lahan, kerusakan lingkungan dan beragam bencana akibat ekspansi HTI dan perkebunan kelapa sawit di kawasan gambut Sumatera. Pembentukan organisasi ini tidak hanya sebatas masyarakat gambut di Pesisir Timur Sumatera, tetapi juga akan didorong untuk membangun hubungan dengan masyarakat hutan gambut di pulau lainnya, di mana harapannya dengan terbentuk jaringan masyarakat gambut di setiap propinsi, akan dapat mendorong kerja-kerja kolektif rakyat untuk menghentikan konflik dan mencegah kerusa-

kan kawasan gambut seperti kebakaran dan ekspansi perkebunan skala besar.

Menurut Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau - Isnadi Esman, tren investasi sawit dan Kehutanan yang merambah ke wilayah gambut dengan membuat kanal-kanal agar bisa ditanami sawit atau akasia membuat kandungan air di wilayah gambut berkurang dan akhirnya rusak. Praktik inilah yang mengancam habitat satwa dan fauna, termasuk masyarakat dan ekologiannya. Dengan fakfa ini, Jaringan Masyarakat Gambut kembali melakukan perjuangan sehingga bisa meminimalkan kerusakan lingkungan.

Aksi damai penuh kritik tajam juga telah dilakukan JMGR bersama masyarakat Jambi , Suku Anak Dalam (SAD) Batin Sembilan, serta SERBUNDO (Buruh). Mereka mengadakan aksi damai bersama buruh dan tani di Medan pada 12 November 2013 lalu. Aksi ini bertepatan dengan agenda pertemuan tahunan RSPO ke 11 di Hotel Santika Medan, Sumatera Utara.

Aksi ini mendesak agar RSPO dan anggotanya segera memberi sanksi keras kepada perusahaan anggota RSPO yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan industri kelapa sawit, menunda memberikan sertifikasi kepada calon perusahaan anggotanya, dan mencabut sertifikasi anggota yang bermasalah dengan masyarakat.

Selain daripada itu, JMGR akan memperkuat masyarakat yang berada di sekitar kawasan gambut dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari memelihara hutan dan wilayah gambut.

Sumber :
cifor.org/wwf.or.id/wetlands.org/greenpeace/rtv.com
dan sumber lainnya (internet)

www.scaleup.or.id

Buletin Scale Up

Penanggung jawab : Harry Oktavian

Penasehat : DR. Iwan Tjitradjaja

Tim Redaksi : Harry Oktavian, Mu'ammam Hamidy, Romes I.P

Hubungi kami :

Jalan Kenari No.15, Kel. Kampung Melayu

Kec. Sukajadi, Pekanbaru 28124 - Riau - Indonesia

Tel. +62-761-4883131. Email : infoscaleup@yahoo.com